

Tunggu Audit BPK Jawab Surat Dewan

MESKI DPRD sudah menyurati sebanyak tiga kali, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih belum punya jadwal yang pasti untuk menyampaikan balasan. Menurut Gubernur, Cornelis, surat balasan yang berisikan penjelasan serta dokumen-dokumen terkait kerjasama pengelolaan aset di sebagian lahan kompleks GOR (aset KONI) masih harus menunggu audit dari BPK RI.

• ke halaman 15 kolom 5

Tunggu Audit BPK Jawab Surat Dewan

Sambungan dari halaman 9

"Jawaban belum selesai, bagaimana mau dijawab. Jawabannya nanti menunggu hasil audit BPK, karena itu juga akan diaudit BPK," tegas Cornelis usai paripurna di DPRD Kalbar, Senin (25/7). Menurutnya, saat ini tim dari BPK sedang bekerja bersama dengan tim dari pemerintahan. Tim itu akan melakukan audit terhadap aset-aset yang ada di Pemprov, baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, termasuk lahan GOR (KONI).

Seperti diberitakan, tentang persoalan aset KONI ini, DPRD telah menyurati Pemprov tiga kali guna meminta penjelasan tertulis tentang kerjasama yang dilakukan

pemprov dengan pihak ketiga di atas lahan tersebut. Surat pertama dilayangkan pada 1 Juni 2011 lalu. Sedangkan surat kedua pada 14 Juni dan surat terakhir ditandatangani Wakil Ketua DPRD, Nicodemus R Toun, Rabu (20/7).

Melalui surat itu, DPRD meminta Pemprov atau eksekutif memberikan data dan dokumen soal penguasaan aset tanah yang disengketakan, dokumen perjanjian kerja sama Pemprov Kalbar dengan PT CPM, aturan perundang-undangan yang dipakai Pemprov, serta dokumen pendukung lainnya. Dalam surat ketiga ini, eksekutif diberikan waktu tujuh hari untuk menyampaikan balasan. Jika masih belum ada jawaban, DPRD mengancam akan menggunakan hak-

haknya, seperti hak interpelasi atau hak angket.

Menanggapi hal ini, Cornelis lagi-lagi menyatakan bahwa jawaban belum selesai dibuat oleh eksekutif. Dia juga meminta agar DPRD tidak main ancam. "Jangan main ngancam-ngancam. Memangnya birokrasi ini robot," ujarnya. Cornelis juga mempersilakan dewan menggunakan hak-haknya.

"Tidak ada saya larang. Silakan, tidak ada masalah," tegasnya. Dalam hal ini, Cornelis mengaku siap menghadapi hak interpelasi atau hak angket tersebut. "Siap! Diapa-apa orang pun saya siap. Saya urus negara ini sejak 1979 sampai hari ini. Bukan tiba-tiba," tambahnya. (rnl)